BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan pengendalian intern kas pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas mekanisme pengendalian intern kas sangat dibutuhkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Hal ini dimaksudkan agar suatu proses untuk menguji dan menilai efektivitas pengendalian intern yang bertujuan untuk memberi kekayaan bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Proses menguji dan menilai efektivitas pengendalian intern dilakukan secara mandiri atau disebut juga "Penilaian Sendiri". Efektivitas mekanisme pengendalian intern pengeluaran kas hampir sesuai dengan teori tetapi penerimaan kas berbeda dengan teori, maka efektivitas mekanisme pengendalian intern kas masih belum berjalan secara optimal.
2. Pengendalian intern kas dalam proses pelaksanaannya Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mengalami hambatan yaitu:
   a. ketersediaan dana sering tidak sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan program dan kegiatan serta ada batasan maksimal penyediaan dana dari setiap kegiatan dan program.
   b. Tidak adanya tanda tangan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengguna Anggaran karena tidak ada ditempat atau dinas keluar kota.

c. Pada proses pelaksanaannya PPTK terlambat menyampaikan bukti transaksi berupa SPJ atas belanja pengeluaran yang dilakukan kepada Bendahara Pengeluaran, terlambatnya SPJ akan berpengaruh terhadap suatu kegiatan dan dampaknya terhadap pencairan dana untuk pembiayaan kegiatan periode ini atau periode berikutnya.

3. Dalam mengatasi hambatan yang terjadi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yaitu dengan cara:
   a. Pengendalian Preventif bahwa adanya rapat teknis melalui realisasi fisik maupun keuangan, pembinaan administratif.
   b. Pengendalian Detektif bahwa pengendalian ini masih belum berjalan secara optimal di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.
   c. Pengendalian Korektif bahwa adanya pembetulan, dikembalikan ke sistem atau regulasi sesuai dengan perundang-undangan.

   Selain itu dengan adanya verifikasi jika kelebihan atau kekurangan dalam penyediaan dana, PPTK atau Pengguna Anggaran memberikan jadwal untuk memberikan persetujuan dan mengetahui atas pengguna anggaran agar pertanggungjawaban tersebut tidak terlambat untuk dilaporkan ke Sub Bagian Keuangan dan Program, memperlancar kegiatan lainnya dengan adanya permintaan tambahan uang persediaan dan pengejaran atau percepatan dalam keterlambatan untuk mencapai kegiatan yang akan dilakukan berikutnya.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan pengendalian intern kas pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan lagi pelatihan dalam bidang akuntansi agar penerapan pengendalian intern kas berjalan secara efektif sesuai yang diharapkan.
2. Perlu ditingkatkan kebijakan-kebijakan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung terhadap adanya keterlambatan dan kelebihan ataupun kekurangan terhadap penyediaan dana agar untuk kegiatan dan program pada periode berikutnya berjalan secara optimal tidak terhambat lagi.
3. Perlu mengadakan evaluasi secara berkala atas pengendalian kas dan membuat jadwal atau janji dengan PPTK dan Pengguna Anggaran agar dapat menghasilkan pertanggungjawaban yang baik dan tidak adanya keterlambatan dalam suatu kegiatan sehingga dapat menciptakan pengendalian yang baik.
4. Seharusnya diadakan suatu pengendalian detektif agar bisa mendeteksi suatu kesalahan baik *human error* ataupun kesalahan dalam sistemnya.